KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

7WSJ0POR

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI	H.1 NOMOR : 2 0	0 0 0 0 1 0 9 5		H.4 X	Final		
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	H.2 X Pembetulan Ke-	0 H.3 Pembatala	n	н.5	Tidak Final		
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
A.1 NPWP : 1 5 4 8 3 8 5 4 4 7 2 2 0 0 0							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : HARDIANTO							
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG	JUMLAH PENGHASILAN	T	TARIF LEBIH		Ī	_	
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK	BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)		
B.1 B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7		
3 21-402-01	1.204.400	1.204.400	0	5	60.220)	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota							
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 026/SP2D-GU/BLUD-RSJDAHM/III/2022							
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 1 6 dd 0 3 mm 2 0 2 2 yyyy							
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.							
Nomor :		Tanggal	dd] mm	уууу		
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK							
C.1 NPWP Instansi Pemerintah :	9 5 3 3 5 0	16 2 722	0 0 0			-	
C.2 Nama Instansi Pemerintah :		RAH ATMA HUSADA MAHAK		ALIMANTAN	ITIMUR		
C.3 ID Subunit Organisasi :		$\overline{\Box}$			<u> </u>		
C.4 Tanggal :	1 6 dd 0 3 mm	2 0 2 2 yyyy		•	_		
C.5 Nama Penandatangan :	HARI JUMADI						
	Dengan ini saya menyatakan ba tandatangani secara elektronik.	ahwa bukti Pemotongan/Pemungut	an Unifikasi telah sa	ıya isi dengan	benar dan telah saya		
	Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diperlu	berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	mengatur bahwa do	okumen ini tela	ah ditandatangani secara		